

# **LAPORAN HASIL PENELITIAN**



**JUDUL:**

**MODEL IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA (PP NO.32 TAHUN 2004) UNTUK MENDUKUNG  
TERWUJUDNYA KINERJA PEMERINTAHAN DESA DAN  
PELAYANAN PUBLIK- KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**

**Tim Peneliti**

**Dr.Suryo Pratolo, SE., M.Si., Ak., AAP-A,(Ketua)**

**Drs. Winarso., MM (Anggota)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
JULI 2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian: Model Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Mendasarkan PP No.37 Tahun 2004 Untuk Mendukung Terwujudnya Kinerja Pemertintahan Desa dan Pelayanan Publik Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir Riau**

1. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr. Suryo Pratolo., SE., M.Si., Ak., AAP-A
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP/NIK : 143075
  - d. Jabatan Struktural : Wakil Rektor II
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
  - g. Pusat Penelitian : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Alamat : Gedung E- Jl Lingkar Selatan-Tamantirto- Kasihan- Bantul -Yogyakarta
3. Telepon/Facs : 0274-387656 Fax: 0274-387646
  - a. Alamat Rumah : Pogung Dalangan SIA XVI/Rt.10/No. 277-B, Sleman, Yogyakarta
  - b. Telepon/Facs/Email : 081 7940 9758/suryo@umy.ac.id
4. Jangka Waktu Penelitian : 10 bulan
5. Pembiayaan
  - a. Jumlah Biaya yang diajukan Rp. 7.220.000,-
  - b. Sumberdana/biaya:
    - UMY : Rp. 5.000.000
    - Suprcenter Consultans & Training : Rp. 2.220.000,-

Yogyakarta, 31 Juli 2013

Mengetahui,

Dekan

Ketua Peneliti,

Dr.Nano Prawoto, SE., M.Si

Dr.Suryo Pratolo, SE., M.Si., Ak., AAP-A

NIK: 143016

NIK : 143075

Menyetujui,

Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Masyarakat (LP3M)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hilman Latief, S.Ag., MA. Ph.D

NIK: 113 033

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the role of the information system supported by information technology in order to optimize village financial management in Indragiri Local Government. The method of research was conducted by questionnaire survey to 100 village governmental officers. Paired sample t-test is used to examine the capability of the officer in financial management before and after the course. The result of the examination show there is capacity improvement in financial management by all the village governmental officers.*

*Maximum theoretical value of the average respondent's answer is 50 and a minimum of 10, so the average is 30, based on the number of questions a 10-point questions and each question has a point value ranging from 1 to 5. Based on the data above, although not maximum, prior to the workshop understanding the village officials are below average (24.15) and after the workshop to increase to above average (38.77).*

*Based on the above findings it is necessary for both the central government and local governments to facilitate the support of information systems in particular financial information system supported by information technology to improve the understanding of the village officials in understanding the philosophy and be able to implement good governance rural finance that can be supported the establishment of good governance government towards civil society.*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadlirat Allah SWT, Penelitian tentang “ *Model Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Mendasarkan PP No.37 Tahun 2004 Untuk Mendukung Terwujudnya Kinerja Pemertintahan Desa dan Pelayanan Publik Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir Riau*”. Telah selesai kami selesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Yang menjadi ketertarikan peneliti mengambil judul ini, antara lain: masih dinilai kurang terkait ketidaktransparan aparatur pemerintah dalam proses pelayanan public; masih adanya pengurusan yang mengharuskan menyambangi banyak meja, hingga tarif pelayanan publik yang masih simpang siur.

Terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak kelemahan, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan tembilahan, (2) Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP 32 Tahun 2004, (3) Masih lemahnya skill (ketrampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (5) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih konvensional (tradisional).

Pada penelitian ini, masalah banyak kekurangan, mulai: biaya, tenaga dan juga tenaga, sehingga kami tetap meminta kritrik, saran dan perbaikan demi penelitian-penelitian masa mendatang. Peneliti meyakini, bahwa dengan pengalaman ini, paling tidak akan membangun road-map(jejak rekam)peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait laporan keuangan.

Pada kesempatan ini, ijinkan kami haturkan ucapan terima kasih kepada: (1) Bapak Rektor UMY, yang telah memberikan kepercayaan untuk memutuskan bahwa tema tersebut layak untuk didanai, (2) Ka.LP3M UMY, yang juga telah membantu informasi dari awal hingga berakhirnya research ini, (3) Dekan Fakultas Ekonomi, yang telah memotivasi kami untuk selalu berjuang dan terus melakukan penelitian ini, hingga kami dinyatakan lolos, (4) Kaprodi akuntansi, yang juga selalu mengavaluasi kinerja dosen setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahunnya beliau meminta untuk tetap mengedepankan Tri Dharma PT (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dan Islam); (5) Teman Dosen di Prodi akuntansi, yang selalu memotivasi kami untuk tetap membuat proposal dan diharapkan dapat membuat artikel jurnal untuk nasioan dan internasional.

Demikiaan laporan penelitian ini disampaikan, semoga bermanfaat bagi Dosen, mahasiswa dan juga memperbanyak bahan bacaan di Perpustakaan UMY, Perpustakaan Pusat UMY, Perpustakaan Nasioanl dan Internasional.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan .....	4
1.3. Tujuan .....	4
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>5</b>
2.1 Pengertian akuntansi Pemerintah .....	5
2.2. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.....	5
2.3. Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	6
2.3.1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat .....	6
2.3.2. Entitas Pelaporan Keuangan .....	7
2.3.3. Tujuan Laporan Keuangan .....	8
2.4. Sistem Pencatatan .....	8
2.5. Dasar Akuntansi .....	10
2.6. Transparansi, Akuntabilitas Sektor Publik Serta Lingkungan Yang mem- Pengaruhi .....	11
2.6.1. Pengertian Transparansi .....	11
2.6.2. Pengertian Akuntabilitas .....	12
2.7. Lingkungan Yang Mempengaruhi .....	13
2.8. Kerangka Teoritis .....	14
2.9. Road Penelitian Berbasis RIP ( Rencana Induk Penelitian ) .....	19
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	21
3.2 Sumber Data .....	22
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	22
3.4 Populasi Dan Sampling .....	23
3.5 Teknik Analisis .....	24
3.5.1. Analisis Korelasi .....	24
<b>BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	<b>27</b>
4.1 Obyek Penelitian .....	27
4.1.1 Data Penduduk .....	28
4.2. Deskriptif .....	30
4.3. Model Perancangan Laporan Keuangan Berbasis IT .....	35
4.4. Hasil Dan Pembahasan .....	37
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>39</b>

5.1 Kesimpulan .....	39
5.2 Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sirkulasi Jumlah Penduduk di Hitung Dalam Bulan di tiap-tiap Kecamatan Pada Kabupaten Indragiri Hilir-Riau .....	28
Tabel 2.	Jumlah Kelahiran, Kematian Penduduk, Data dan Pindah di Tiap-Tiap Kecamatan Pada kabupaten Indragiri Hilir – Riau(Laki dan Perempuan).....	29
Tabel 3	Jumlah Penduduk di Hitung Pada Akhir Bulan di Tiap-Tiap Kecamatan Pada Kabupaten Pada kabupaten Indragiri Hilir – Riau(Laki dan Perempuan).....	29

## DAFTAR GAMBAR

1. Road Map (Rekam Jejak ).....	19
2. Letak Geografi Kabupaten Indragiri Hilir-Riau.....	27



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Fenomena umum dari sistem pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, secara tersirat bahwa seharusnya semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut hendaknya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Disamping itu, dukungan terhadap pemerintahan desa juga didukung pasal 212 pada ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, tentang desa dan keputusan Menteri Dalam Negeri (MENDRAGI) Nomor 130 tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri, yang intinya keuangan desa harus : tranparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang di sebut (RKPDesa) adalah hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seorang kepala desa juga harus mendasarkana visi, misi dari seorang kepala desa terpilih. Kemudian kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Sesuai penjabaran di atas, pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas publik pada pemeritahan desa harus dapat diwujudkan dengan menerapkan sebuah sistem

akuntansi pemerintahan desa yang *transparency* dan *accountable*. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat.

Fenomena khusus, peneliti mencoba mengkaji kinerja pemerintahan Propinsi Riau dalam hal meningkatkan pelayanan publik, masih dinilai kurang. Salah satunya, ketidaktransparan aparatur pemerintah dalam proses pelayanan publik. Penegasan ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif, saat membacakan sambutan Gubernur Riau HM Rusli Zainal, pada saat membuka Workshop Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pememerintah Provinsi Riau 2010, Rabu (**PEKANBARU,RIAUPLUS.COM25/11**) di Hotel Mutiara Merdeka. "Kelemahan pemerintah saat ini diyakni kurangnya transparannya pelayanan publik. Diantaranya tentang prosedur, biaya dan waktu untuk pelayanan publik," ujar Abdul Latif. Untuk itu lanjut Latif, dalam reformasi birokrasi perlu ditingkatkannya pelayanan publik. Dalam hal ini, Gubernur Propinsi Riau telah mengeluarkan instruksi nomor 1 Tahun 2007 tentang penyusunan standar pelayanan publik kepada bupati/walikota Se-Riau, kepala dinas/ badan dan biro di lingkungan Pemprov Riau. Melalui workshop ini, Latif mengharapkan adanya pemahaman dalam menyusun standar pelayanan publik dan standar operating prosedur (SOP). Selain itu, meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. "Kalau memang prosedurnya bisa selesai dalam satu jam, jangan ditunggu hingga besok pula. Ini yang harus yang kita ubah, agar pelayanan publik itu benar-benar optimal. Sesuai Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik," tegasnya. Workshop yang dibuka Biro Hukum Setdaprov Riau ini, diikuti hampir seluruh satuan kerja yang di lingkungan Pemprov Riau. Hadir sebagai nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jeffri E. Muller Kabid Polhukkam pada Deputi Ketatalaksanaan dan MangapuL Sitorus Asisten Deputi Pelayanan Publik.

Sampai saat ini, masyarakat masih merasakan pelayanan birokrasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Masih adanya pengurusan yang mengharuskan menyambangi banyak meja, hingga tarif pelayanan publik yang masih simpang siur. Eko berjanji akan terus berusaha sehingga lembaga dan kementerian yang menjalankan reformasi birokrasi tadi terus berbenah. Lemahnya aspek pelayanan publik ini muncul bukan tanpa alasan. Diduga, seluruh instansi tadi

masih fokus pada pembenahan internal. Diantaranya adalah restrukturisasi organisasi dan penataan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai. Eko mengatakan ada perkembangan positif dari reformasi birokrasi. Diantaranya adalah penataan SDM di sebuah lembaga atau kementerian. “Seperti kita lihat di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian,” ujar dia. Eko menegaskan, penataan SDM internal merupakan salah satu upaya menerapkan reformasi birokrasi. Menurut Eko, pelayanan publik yang bagus tentu diawali dengan penataan SDM internal yang optimal. Namun, dia meminta penataan SDM internal ini tidak terlalu memakan waktu yang lama. Perkembangan lain dari program reformasi birokrasi adalah, kian tumbuhnya pemanfaatan teknologi informasi. Diantara yang paling mencolok dari penggunaan teknologi ini dalam sistem lelang elektronik. Menurut Eko, penggunaan sistem lelang elektronik ini mampu menghemat anggaran negara. Menurutnya, tahun 2011 total nilai lelang elektronik mencapai Rp51 triliun. Dari nilai itu, Eko mengatakan pemerintah berhasil menghemat sebanyak Rp5 triliun. “Tahun ini kita genjot total nilai lelang elektronik sebesar Rp200 triliun,” kata dia. Dengan nilai tadi, diharapkan bisa terjadi penghematan antara Rp20 triliun sampai Rp25 triliun. Eko mengatakan, masyarakat jangan hanya memaknai program reformasi birokrasi hanya untuk urusan tunjangan remunerasi. Dia menegaskan, kedepan tidak semua pegawai yang bekerja di instansi atau lembaga menerima tunjangan remunerasi. Walaupun di instansi itu sudah menerapkan reformasi birokrasi. “Kunci utama adalah kinerja dan pelayanan. Jika keduanya baik, tunjangan kinerja atau remunerasi bisa didapatkan.

Sedangkan terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak kelemahan, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan tembilahan, (2) Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP 32 Tahun 2004, (3) Masih lemahnya skill (ketrampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (5) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih konvensional(tradisional).

## **1. Permasalahan**

Atas dasar latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sistem Operasi dan Prosedur Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Indragiri Hilir-Riau?
- b. Bagaimana Model Perancangan Keuangan Desa Berbasis IT di Kecamatan Indragiri Hilir-Riau?
- c. Bagaimana hasil sosialisasi pelatihan sebelum dan setelah pelatihan laporan keuangan desa berdasarkan PP No.37 Tahun 2004 untuk mendukung terwujudnya kinerja Pemertintahan Desa?

## **2. Tujuan**

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui SOP laporan keuangan desa se Kecamatan Tembilhan – Indragiri Hilir – Riau.
- b. Untuk mengatui Model Perancangan Keuangan Desa Berbasis IT di Kecamatan Indragiri Hilir-Riau.
- d. Untuk mengetahui hasil sosialisasi pelatihan sebelum dan setelah pelatihan laporan keuangan desa berdasarkan PP No.37 Tahun 2004 untuk mendukung terwujudnya kinerja Pemertintahan Desa.

## **3. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Perguruan Tinggi**

Dapat menumbuh kembangkan keilmuan dan meningkatkan kasanah ilmu, dalam penelitian ini terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Nomer 32 Tahun 2004.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Dapat menambah informasi dan mendukung kebijakan terkait masalah anggaran, laporan keuangan serta evalausai tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Nomer 32 Tahun 2004.

### **3. Bagi Masyarakat**

Dapat menambah kasanah bacaan dan juga informasi terkait kebijakan, keputusan dan strategi pemerintah terkait sistem keuangan desa.

## **BAB II TINJAUN PUSTAKA**

### **2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang berkembang cukup pesat akhir-akhir ini. Perkembangan ini mempengaruhi oleh meningkatnya perhatian dan tuntutan masyarakat akan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara. Menurut **Nordiawan et all (2008 : 3)** “ Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah”. Menurut **Ismaya (2006 : 307)** “ Akuntansi Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah”. Menurut **Arifin dan Ghozali (2001 : 5)** “ Akuntansi Pemerintahan merupakan data akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*nonprofit organization*)”.

Jadi berdasarkan dari beberapa definisi diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa akuntansi pemerintah adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba (*Nonprofit organization*) yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba.

### **2.2. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Adapun karakteristik akuntansi pemerintah terdiri dari beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan sebagai berikut, **Baswir (2000 : 11)**:

- a) Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan;
- b) Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan.

- c) Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya.
- d) Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

### **2.3.Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Menurut **Arifin dan Ghozali (2001 : 111)** “ Pelaporan Keuangan Pemerintah merupakan laporan keuangan yang menunjukkan keadaan rekening budgetair dan rekening proprietary harus disusun secara periodik (bulanan, kuartalan, tahunan) untuk pengendalian kegiatan keuangan”.

#### **2.3.1.Laporan Keuangan Pemerintah Pusat**

Laporan keuangan merupakan output yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi. Untuk pemerintah pusat, laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan dua subsistemnya, yaitu : Laporan keuangan yang dihasilkan SiAP dan SAI. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

- b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara dengan kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### 2.3.2. Entitas Pelaporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Menurut **PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah paragraf 19** dinyatakan bahwa entitas Pelaporan keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari :

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah daerah;

c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

### 2.3.3. Tujuan Laporan Keuangan

Setiap sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki tujuan begitu juga dengan laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan dilihat dari beberapa pendapat. Berdasarkan **PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah No.01** tujuan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut **Stándar Akuntansi Keuangan (2007: 3)** “Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan“.

### 2.4. Sistem Pencatatan

Menurut **Halim (2002:36)** menyatakan ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry* dan *triple entry* berikut dijelaskan masing-masing sistem pencatatan tersebut :

#### a. *Single Entry*

*Single Entry* disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran“. Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain



yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan dalam penyusunan pelaporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan diatas. Sistem ini disebut dengan sistem pencatatan *double entry*.

#### **b. Double Entry**

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali (*double* = berpasangan/ganda, *entry* = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini sering disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada disebelah kiri sedangkan disisi kredit ada disebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami pencatatan sistem ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut :

$$\text{Aktiva} + \text{Belanja} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Pemilik} + \text{Pendapatan}$$

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang dilakukan sama dengan untuk belanja. Hal yang sebaliknya yang dilakukan untuk hutang, ekuitas dana dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya hutang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya hutang, maka pencatatan akan dilakukan disisi debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan. Cara melakukan pencatatan sistem *double entry* atau menjurnal ini adalah dengan mencatat sisi debit tepat disisi kiri dan mencatat disisi kredit agak menjorok ke kanan 1-2 cm.

#### **c. Triple Entry**

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, satuan pemegang kas pada satuan kerja (satker) maupun pada bagian keuangan badan/biro

pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Pada kantor PPPPTK IPA sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pembukuan berpasangan (*double entry*) karena dengan menggunakan sistem ini khususnya pada bagian pembukuan dapat dengan mudah mengakui atau mencatat suatu transaksi atau peristiwa lain pada sisi debit dan kredit dengan nilai yang sama. Pencatatan tersebut akan menghasilkan keseimbangan persamaan akuntansi pada posisi keuangan, sehingga aset sama dengan kewajiban dan ekuitas dana.

## **2.5. Dasar Akuntansi**

Menurut **Bastian (2007 :66)** menyatakan “Dasar akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Dasar akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Terdapat empat macam dasar akuntansi yaitu, sebagai berikut :

### **a. Akuntansi berbasis kas**

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah, yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana, dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk laporan Penerimaan dan Pengeluaran atau arus kas. Selain itu, perlu dibuat suatu catatan atas laporan keuangan atau yang menyajikan secara detail item-item yang ada dalam laporan keuangan dan informasi tambahan seperti :

- Item-item yang diakui dalam akuntansi berbasis akrual, seperti aktiva tetap dan utang/pinjaman.
- Item-item yang biasa diungkapkan dalam akuntansi berbasis akrual, seperti komitmen, kontinjensi, dan jaminan.
- Item-item lain, seperti informasi yang bersifat prakiraan (*forecast*).

**b. Modifikasi dari akuntansi berbasis kas**

Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan Pengeluaran kas yang terjadi selama satu periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu. Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

**c. Akuntansi berbasis akrual**

Akuntansi berbasis akrual berarti basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

**d. Modifikasi dari akuntansi berbasis akrual**

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun.

**2.6. Transparansi, Akuntabilitas Sektor Publik serta Lingkungan yang mempengaruhi**

**2.6.1. Pengertian Transparansi**

Salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan adalah transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut **Mardiasmo (2002:30)** pengertian transparansi adalah ” Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat”. Menurut **Nordiawan (2006 : 131)** menyatakan “ Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka

dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa transparansi suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

### 2.6.2. Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut **Arifin dan Ghozali (2001 : 52)** menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggung jawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”. Menurut **Mardiasmo (2002:29)** mengatakan ” Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Menurut **Nordiawan (2006:35)** mengatakan ” Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Seperti yang telah dijabarkan dari beberapa definisi tersebut menurut **Mardiasmo (2002 : 21 )** menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

- Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik.

- Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilita Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

- Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

- Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai pengertian akuntabilitas maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Surplus/Defisit, LRA, Neraca dan CaLK. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja *Financial* Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

## **2.7. Lingkungan yang mempengaruhi**

Untuk mencapai suatu tujuan, maka pengaruh lingkungan akan sangat mempengaruhi kesuksesan pencapaian tujuan tersebut. Lingkungan yang mempengaruhi pencapaian transparansi dan akuntabilitas suatu entitas adalah lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat dan memperlemah keefektifan transparansi dan akuntabilitas entitas atas wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Diantara faktor-faktor yang relevan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat antara lain, yaitu :

- a. Falsafah dan konstitusi Negara
- b. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional

- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
- e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- f. Pengakuan hukum yang memadai
- g. Tingkat keterbukaan pengelolaan
- h. Sistem manajemen birokrasi
- i. Jangkauan pengendalian dan kompleksitas program

Kesembilan faktor tersebut tidak saling bertentangan akan tetapi saling mempengaruhi corak transparansi dan akuntabilitas secara simultan dan saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga diurai pengaruhnya tanpa mengaitkan satu faktor dengan faktor yang lain.

## **2.8.Kerangka Teoritis**

Manajemen kinerja adalah suatu upaya untuk memperoleh dan meningkatkan hasil terbaik dari tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Manajemen kinerja bersifat menyeluruh meliputi semua elemen, input yang harus didayagunakan oleh organisasi dan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga manajemen kinerja berhubungan dengan perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada semua aspek manajerial. Dari semua aspek manajerial tersebut terkait dengan penggunaan sumber daya termasuk di dalamnya penggunaan sumber daya keuangan yang harus dikelola secara baik.

Dalam pengelolaan keuangan, selalu bisa terjadi kondisi seperti apa yang diungkapkan dalam *agency theory*. Berdasarkan *agency theory*, hubungan keagenan timbul manakala pihak pemberi amanah (*principal*) memberikan amanah kepada pihak lain (*agent*) guna melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan *principal*. Pemerintah selaku pihak yang diberikan amanah untuk mengelola dana masyarakat harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut, sebaliknya rakyat selaku pemberi amanah akan memberi insentif pada pemerintah berupa kepercayaan politik. *Agency theory* menyatakan bahwa setiap orang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan yang diambil dalam organisasi

(Jensen dan Meckling, 1976). Diharapkan konflik keagenan dapat dipecahkan dan kebutuhan untuk kepatuhan atau *stewardship* aparatur pemerintahan kepada rakyat dapat dicapai dengan pengelolaan organisasi yang baik termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Berdasarkan kondisi di atas peran aturan, mekanisme, prosedur, pemahaman dan kualitas SDM mengenai tatakelola keuangan organisasi termasuk di dalamnya organisasi pemerintahan desa dibutuhkan.

Pengelolaan atau tatakelola organisasi diistilahkan dengan kata *governance*. Kata *governance* berasal dari kata *to govern* yang artinya memerintah. Tatakelola yang baik atau diistilahkan *good governance* yang memiliki 8 karakteristik utama, meliputi partisipatori, orientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, keadilan dan inklusif, dan penegakan hukum (UNDP, 1997). Dalam rangka mencapai *good governance* pemerintahan desa, salah satunya dengan penataan tatakelola keuangan desa yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bisa mendukung pengungkapan informasi yang menjadi hak masyarakat sebagai pemberi amanah kepada pemerintah desa. Pengungkapan diistilahkan dengan kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Gibbins, Richardson and Waterhouse (1990,) mendefinisikan *disclosure* keuangan sebagai pengungkapan informasi baik keuangan maupun non keuangan, kuantitatif maupun kualitatif, wajib maupun sukarela, melalui jalur formal maupun informal. Dengan demikian informasi terkait pengelolaan keuangan yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi utama pemerintahan desa yang didanai dari dana publik.

Untuk dapat mewujudkan tatakelola keuangan yang mampu mendukung pengungkapan yang transparan dan akuntabel, tata kelola keuangan pemerintahan desa memerlukan dukungan sistem informasi yang difasilitasi teknologi informasi untuk tercapainya ketepatan dan kecepatan tatakelola keuangan desa. Sistem informasi adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya atau sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia-mesin, untuk menyediakan informasi dalam rangka mendukung operasi, manajemen dalam suatu organisasi. Menurut O'Brien (2005), sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun dari *people* (orang), *hardware* (perangkat keras), *software* (piranti lunak), *computer networks* and *data communications* (jaringan komunikasi), dan *database* (basis data) yang

mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam organisasi. Sistem informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kualitas tatakelola keuangan secara efisien dan efektif.

Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Selanjutnya, teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. (Sri Maharsi, 2000). Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Ada tiga aspek dalam tata kelola keuangan desa yaitu perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Adapun kegunaan dalam suatu perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membedakan arah dari setiap kegiatan dengan jelas sehingga hasil yang diperoleh bisa seefektif dan seefisien mungkin.
- b. Untuk mengevaluasi setiap tujuan-tujuan yang sudah dilakukan sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga bisa dihindari lebih awal.
- c. Memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul sehingga sehingga lebih waspada dan dan dapat diselesaikan dengan cepat.
- d. Menghindari pertumbuhan dan perkembangan yang tak terkendali.



Menurut Gomes (1995), anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Dari sisi fungsi perencanaan, anggaran merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dari fungsi pengawasan, anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Dari sisi fungsi koordinasi, anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam organisasi, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam organisasi, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Dari sisi anggaran sebagai pedoman kerja, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Menurut Marconi dan Siegel (1989), manfaat anggaran adalah:

1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang.
2. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan.

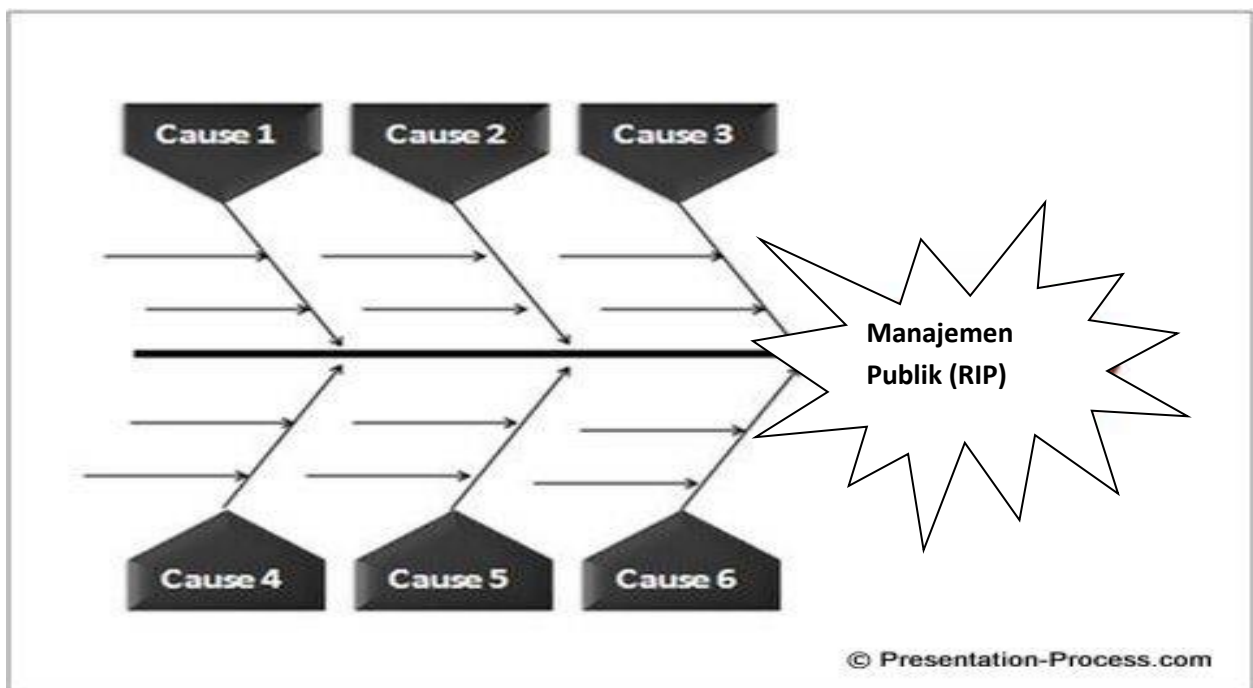
3. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.
4. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil.
6. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

Penatausahaan keuangan daerah adalah suatu sistem akuntansi yang dilaksanakan baik secara manual maupun berbasis sistem informasi yang dilaksanakan untuk melakukan proses pencatatan, administrasi, dan pelaporan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka menyusun laporan keuangan desa, perlu disusun sistem akuntansi pemerintahan desa. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi-komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabila ketersediaan sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka hal tersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem manajemen secara keseluruhan. Artinya dalam hal ini agar kinerja yang dihasilkan dapat bermanfaat atau dapat dicapai dengan cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat untuk itu para aparatur harus didukung dengan penerapan sistem dan teknologi informasi. Peran sistem dan teknologi informasi ini sangat penting disamping untuk mengikuti perkembangan teknologi juga untuk bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk kelancaran kerja agar nantinya pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan akurat. Dalam rangka mendukung implementasi pengelolaan keuangan desa, bentuk sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah Sistem Informasi Keuangan Desa yang disingkat dengan SIKADES. SIKADES adalah

sistem informasi yang digunakan untuk mendukung tatakelola keuangan desa baik dalam tahapan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan, maupun pelaporan keuangan desa. Untuk dapat mendukung optimasi implementasi tatakelola keuangan desa, selain aspek sistem dan teknologi informasi, aspek kapasitas aparatur desa dalam menguasai tatakelola keuangan desa tersebut merupakan kunci keberhasilan, sehingga pelatihan sistem informasi yang didukung teknologi informasi diduga mampu mendukung pemahaman dan penguasaan tatakelola keuangan desa yang akhirnya meningkatkan optimasi tatakelola keuangan desa itu sendiri. Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

**Ha: Terdapat perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap tatakelola keuangan desa antara sebelum dan sesudah dilakukan workshop tatakelola keuangan desa menggunakan sistem informasi keuangan desa yang didukung teknologi informasi.**

## 2.9. Road Penelitian Berbasis RIP (Rencana Induk Penelitian)



1	Suryo pratolo, (2006)	Pengaruh Komitmen Manajemen, Pengendalian Internal, Audit Manajemen terhadap Good Corporate Governance dan Kinerja Organisasi Pada BUMN di Indonesia
2	Astri Furqani, (2010)	Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good governance (Studi Pada Pemerintahan Desa kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)
3	Nouruz ZamanOktay,(2010)	Otonomi Desa dan pemerintahan Desa:Studi Kasus

		Pemerintahan desa Bobotsari
4	Aprisiami Putriyanti(2012)	Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik-Kecamatan Grabag-Kabupaten Purworejo
5	Yoyok Sudarmaji, (2009)	Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana-Kabupaten Pati.
6	Indro Budiarto, (2007)	Penilaian masyarakat desa terhadap pemerintahan desadalam era otonomi daerah (survey:Desa Sriharja,Kecamatan Imogiri-bantul-DIY)

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, menurut Sugiyono (2009 : 1). Penelitian dengan cara ilmiah, berarti penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya cara yang digunakan dalam penelitian itu teramati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Tujuan umum penelitian adalah untuk membangun model, memecahkan masalah, maka langkah yang harus ditempuh sangat relevan dengan masalah yang dirumuskan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik, maka peneliti bukan saja harus mengetahui aturan dalam melakukan penelitian, tetapi juga harus mempunyai keterampilan yaitu dengan menggunakan metode ilmiah dalam melaksanakan penelitian. Untuk dapat menerapkan metode ilmiah dalam penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi lingkungan penelitian yang akan dikerjakan.

Desain penelitian berfungsi untuk mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan atas fenomena/masalah yang diteliti, dan proses pelaksanaannya dilakukan secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan *survey* dengan metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus menurut Hasan (2004:11), yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuannya untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus maupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Objek yang diteliti adalah suatu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Metode ini umumnya menghasilkan gambaran berupa Model, Uji hipotesis, sintesa dari keputusan pada satu jangka waktu yang berhasil dikumpulkan dan dianalisa. Sedangkan data yang dijadikan bahan penelitian adalah

bersifat kuantitatif dan kualitatif yang bersumber pada kuesioner dan perancangan model laporan keuangan.

### **3.2. Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian terdiri dari dua yaitu :

#### **1. Data Primer**

adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung baik individu atau kelompok yaitu dengan melakukan observasi, kuesioner, forum diskusi langsung dengan kepala desa atau wakilnya.

#### **2. Data Sekunder**

adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh Kantor Kecamatan Indra Giri Hilir –Kabupaten Indra Giri-Propinsi Riau), meliputi : laporan anggaran, laporan keuangan, data jumlah penduduk, data pendapatan daerah, pendapatan desa, serta data pelayanan desa.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan seperangkat cara ilmiah yang digunakan penulis untuk memperoleh data sebagai sumber penelitian baik itu dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Menurut Nazir (2005 : 174) “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Untuk mengumpulkan data–data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Yaitu pengumpulan data dengan cara mendatangi langsung ke lokasi objek penelitian yaitu Kecamatan Indra Giri Hilir-Indra Giri-Riau. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Adapun pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

##### **a. Wawancara (*interview*)**

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden, dalam penelitian ini adalah kepala desa di Kecamatan Indra Giri Hilir-Indra Giri-Riau.

## **b. Daftar Pertanyaan (*Quesioner*)**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengedarkan lembaran daftar pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan diisi seluruh kepala desa/yang mewakili di Kecamatan Indra Giri Hilir-Indra Giri-Riau berkaitan dengan peranan akuntansi dalam penerapan anggaran serta pengelolaan keuangan desa.

## **2. Studi Kepustakaan (*Literature Research*)**

Studi kepustakaan atau studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai literatur (seperti buku, jurnal akuntansi, internet dan lain-lain) yang menunjang pelaksanaan penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan serta teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

### **3.4. Populasi dan Sampling**

Dalam penelitian ilmiah ini tidak terlepas dari sumber data yaitu populasi dan sampel. Pemilihan populasi dan sampel tergantung dari permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2009 : 297) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud populasi dari penelitian ini adalah responden adalah seluruh Kepala desa di Kabupaten Indra Giri Hilir-Indra Giri-Riau dengan jumlah 20 Kecamatan dengan jumlah desa 480 desa. Sedangkan dari populasi tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 100 desa untuk mewakili dalam penelitian ini, dengan cara memberikan dan mengisi kuesioner.

### **3.5. Teknik Analisis**

Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif berupa instrumen kuesioner dan analisis kuantitatif berupa perhitungan tabulasi hasil kuesioner.

#### **1. Analisis Kualitatif**

Metode analisis kualitatif adalah sebuah metodologi penelitian yang didalamnya mencakup pandangan-pandangan falsafah mengenai *dicipline inquiry* yang ada pada studi ilmu-ilmu sosial dan tingkah laku.

#### **2. Analisis Kuantitatif**

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis masalah yang dapat diwujudkan dalam jumlah tertentu/diwujudkan dalam kualitas tertentu.

Data yang akan dianalisa adalah dari hasil penelitian. Rancangan analitis data menggunakan pengukuran skala data ordinal, yaitu tingkat ukuran yang memungkinkan peneliti mengurutkan hasil pertanyaan respondennya dari tingkat yang paling rendah ketingkat yang paling tinggi, dengan dasar skala pengukuran tersebut setiap pertanyaan dalam data tersebut diberi nilai sebagai berikut :

- Pernyataan Positif :		Nilai
SS	Sangat Setuju	5
ST	Setuju	4
RG	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1
- Pernyataan Negatif :		Nilai
SS	Sangat Setuju	1
ST	Setuju	2
RG	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	4
STS	Sangat Tidak Setuju	5

### **3.5.1. Analisis Korelasi**

Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif berupa instrumen kuesioner dan analisis kuantitatif berupa perhitungan tabulasi hasil kuesioner.

#### **1. Uji Validitas dan Realibilitas Alat Ukur**

Uji validitas dan realibilitas alat ukur dilakukan untuk memastikan instrumen tersebut merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Validitas menjelaskan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Apabila validitas suatu alat ukur semakin tinggi maka semakin tinggi pula ketepatannya. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for windows version 17.00*



(*Statistic Program for Social Science*) yang dalam pengolahannya menggunakan rumus *Rank Spearman*.

Sedangkan Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama. Realibilitas kuesioner menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Keandalan suatu alat ukur menunjukkan ketepatan, kemantapan suatu alat ukur yang baik, dalam hal ini kuesioner haruslah berisi pertanyaan – pertanyaan yang jelas sehingga hasilnya memang benar – benar sesuai dengan kenyataan. Metode yang digunakan dalam pengujian alat ukur pada penelitian ini adalah metode alpha *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) yang terdapat dalam program *SPSS for windows version 17.00* (*Statistic Program for Social Science*). Jika *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 maka alat uji tersebut dikatakan reliabel. Harga koefisien berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 1 maka semakin besar keandalan alat ukur tersebut dan menunjukkan konsistensi yang tinggi.

## 2. Analisis Koefisien Korelasi *Rank Spearman*

Ukuran yang dipakai untuk mengetahui tingkat hubungan X dan Y disebut uji koefisien korelasi *Rank Spearman*, yaitu alat analisis koefisien korelasi digunakan untuk mempelajari hubungan variabel – variabel yang diukur didalam skala ordinal sehingga dapat dibuat ranking dalam suatu rangkaian berurutan. Untuk mengetahui besarnya keeratan hubungan antara peranan akuntansi pertanggungjawaban terhadap efektifitas pengendalian biaya pemasaran digunakan rumus koefisien korelasi sebagai berikut :

$$rs = 1 - \left[ \frac{6 \sum d_1^2}{n^2 - n} \right]$$

Persamaan 3.1

Rumus Koefisien Korelasi *Rank Spearman*

Keterangan :

rs = Nilai korelasi *rank Spearman*

$d^2$  = Selisish setiap pasangan *rank*

n = Jumlah pasangan untuk *spearman*

Kemudian untuk mengetahui nilai dari hubungan yang didapat, dapat dilihat berdasarkan tabel interprestasi nilai koefisien korelasi berikut ini :

Tabel 3.1  
Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi

<b>No</b>	<b>Koefisien Korelasi</b>	<b>Interpretasi</b>
1	0,00 – 0,199	Sangat Rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Sedang
4	0,60 – 0,799	Kuat
5	0,80 – 1,000	Sangat Kuat

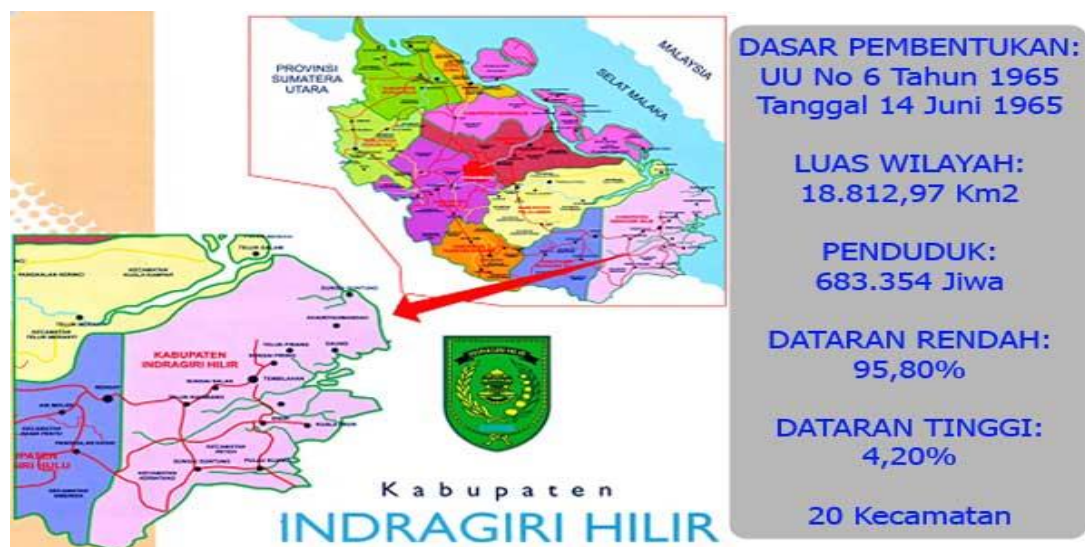
(Sumber, Sugiyono 2009 : 231)

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

### 4.1. Obyek Penelitian.

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 ( LN RI No. 49 ). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 Km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "*NEGERI SERIBU JEMBATAN*" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. 0 36' Lintang Utara; 07' Lintang Selatan; 04 10' Bujur Timur; 02 30' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau(Lihat Peta)



**Gambar:1**  
**Letak Geografi Kabupaten IndraGiri Hilir-Riau**

#### 4.1.1. Data Penduduk

Kabupaten Indragiri Hilir ibaratnya Indonesia Mini, tempat bermukimnya berbagai suku bangsa, diantaranya populasi dengan jumlah yang cukup besar adalah suku Melayu, suku Bugis/Makasar, dan Banjar. Suku Melayu merupakan penduduk yang telah lama bermukim di daerah ini, kemudian dalam perjalanan waktu komunitas ini berassimilasi dengan komunitas lainnya yang datang kemudian. Kedatangan orang Bugis/Makasar dan Banjar berhasil bersama orang Melayu membuka perkebunan-perkebunan kelapa dan ladang-ladang padi yang luas dari hutan-hutan rawa yang sangat subur dengan membangun parit-parit yang jumlahnya sangat banyak, sehingga Indragiri Hilir di kenal juga dengan sebutan negeri seribu parit, negeri penghasil kelapa terbesar dan sebagai lumbung padi.

Suku-suku lainnya seperti Minang, Jawa, Tapanuli dan sebagainya datang sebagai pedagang, buruh dan pegawai pemerintah yang pada umumnya tinggal di kota-kota dan pasar-pasar. Semua suku bangsa yang hidup di Indragiri Hilir ini dengan budaya dan tradisinya masing-masing hidup dengan damai berdampingan. Budaya mereka saling terjaga dan perlahan-lahan mulai berbaur menjadi pendukung budaya nasional. Mereka juga telah menjadi suatu generasi baru dengan cara pandang yang semakin maju dan ingin secara bersama-sama membangun tanah kelahirannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak tertinggal dari daerah lainnya.

**Tabel:1**  
**Sirkulasi Jumlah Penduduk di Hitung Dalam Bulan**  
**di Tiap-Tiap Kecamatan Pada Kabupaten Indra Gili Hilir-Riau**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK AWAL BULAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	TEMBILAHAN	31.114	30.489	61.603
2	TEMPULING	13.631	13.960	27.591
3	KUINDRA	17.254	16.560	33.814
4	ENOK	19.241	18.141	37.382
5	TANAH MERAH	17.122	15.277	32.399
6	RETEH	22.408	22.079	44.487
7	KERITANG	29630	28.942	58.572
8	MANDAH	23.953	22.984	46.937
9	GAS	11.681	11.405	23.086
10	KATEMAN	25.086	20.452	45.538
11	BATANG TUAKA	13.116	13.230	26.346
12	GAUNG	19.944	20.340	40.284
13	TEMBILAHAN HULU	19.020	19.747	38.767
14	PELANGIRAN	16.280	13.444	29.724
15	TL. BELENGKONG	9.966	9.058	19.024
16	PL. BURUNG	14.590	14.781	29.371
17	KEMUNING	9.854	9.879	19.733
18	SUNGAI BATANG	6.348	6.131	12.479
19	CONCONG	6.613	6.446	13.056
20	KEMPAS	15.011	14.340	29.351
	<b>JUMLAH</b>	<b>341.862</b>	<b>327.685</b>	<b>669.547</b>

**Tabel:2**  
**Jumlah Kelahiran, Kematian, Penduduk, Data dan Pindah**  
**di Tiap-Tiap Kecamatan Pada Kabupaten Indra Gili Hilir-Riau (Laki/Perempuan)**

NO	KECAMATAN	LAHIR			MATI			DATANG			PINDAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	TEMBILAHAN	4	4	8	3	3	6	20	15	35	25	24	49
2	TEMPULING	10	4	14	1	4	5	2	1	3	8	8	16
3	KUINDRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ENOK	11	8	19	6	4	10	11	12	23	8	9	17
5	TANAH MERAH	7	6	13	3	4	7	-	-	-	5	5	10
6	RETEH	3	4	7	1	1	2	3	4	7	-	1	1
7	KERITANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MANDAH	6	11	17	3	4	7	24	12	36	1	2	3
9	GAS	16	14	30	5	2	7	2	1	3	3	1	4
10	KATEMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BATANG TUAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	GAUNG	6	9	15	3	5	8	6	5	11	-	-	-
13	TEMBILAHAN HULU	4	2	6	5	2	7	10	5	15	1	3	4
14	PELANGIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	TL. BELENGKONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PL. BURUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KEMUNING	5	5	10	1	-	1	2	-	2	-	-	-
18	SUNGAI BATANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	CONCONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KEMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>139</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>55</b>	<b>135</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>104</b>

**Tabel:3**  
**Jumlah Penduduk di Hitung Pada akhir Bulan**  
**di Tiap-Tiap Kecamatan Pada Kabupaten Indra Gili Hilir-Riau**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK AKHIR BULAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	TEMBILAHAN	31.110	30.481	61.591
2	TEMPULING	13.634	13.953	27.587
3	KUINDRA	17.254	16.560	33.814
4	ENOK	19.249	18.148	37.397
5	TANAH MERAH	17.121	15.274	32.395
6	RETEH	22.413	22.085	44.498
7	KERITANG	29.630	28.942	58.572
8	MANDAH	23.979	23.001	46.980
9	GAS	11.691	11.417	23.108
10	KATEMAN	25.086	20.452	45.538
11	BATANG TUAKA	13.116	13.230	26.346
12	GAUNG	19.953	20.349	40.302
13	TEMBILAHAN HULU	19.028	19.749	38.777

14	PELANGIRAN	16.287	13.444	29.724
15	TL. BELENGKONG	9.966	9.058	19.024
16	PL. BURUNG	14.590	14.781	29.371
17	KEMUNING	9.860	9.884	19.744
18	SUNGAI BATANG	6.348	6.131	12.479
19	CONCONG	6.613	6.446	13.059
20	KEMPAS	15.011	14.340	29.351
	<b>JUMLAH</b>	<b>341.932</b>	<b>327.725</b>	<b>669.657</b>

## 4.2. Deskriptif

Peluang Bisnis dan Investasi di Kabupaten Indragiri Hilir sangat terbuka lebar bagi para Bisnisan dan Investor baik dalam negeri maupun Manca Negara untuk berbagai sektor kegiatan. Yang di tunjang semakin meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dan apa lagi telah bergulirnya otonomi daerah, maka daerah telah mempunyai kewenangan yang luas dalam hal penanaman modal/investasi dan secara umum peluang peluang tersebut sebagai berikut:

### 1. PERKEBUNAN

Sektor perkebunan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah dikembangkan selama ini adalah kelapa lokal, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan pinang. Dari berbagai komoditas itu, kelapa lokal merupakan primadona. Potensi hasil perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir yakni produksi kelapa Dalam mencapai 390.924,28 ton pertahun dengan luas lahan 295.380,24 Ha. Untuk kelapa hibrida tercatat produksi sebanyak 67.055,69 ton dari luas lahan 28.770 Ha. Sedangkan untuk produksi kelapa sawit sebanyak 567.802,56 ton dari lahan seluas 76.353,45 Ha. Untuk jenis komoditi karet dengan luas areal 4.861 Ha, kopi 1.338 Ha, sagu 17.656 Ha, kakao 2.170 Ha, pinang 15.413, nipah 17.435 Ha. dan aneka tanaman perkebunan lainnya 303 Ha. Dengan potensi tersebut membuat Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai salah satu daerah kelapa terbesar di Dunia, bahkan dijuluki sebagai “Tanah Hambaran Kelapa Dunia” Potensi lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah seluas 722.806 Ha. dan telah dimanfaatkan sekitar 600.691 Ha.

## **2. PERIKANAN dan KELAUTAN**

Peluang investasi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari penangkapan di perairan laut, budidaya air payau (tambak), budidaya laut (keramba jaring apung), budidaya air tawar (minatani) dan pengolahan tepung ikan. Potensi perikanan tangkap di perairan laut sebesar 109,212 ton/th dengan tingkat pemanfaatan pada tahun 2008 sebesar 35.277,76 ton/th (32,30 %), dibidang budidaya perikanan daerah ini memiliki potensi lahan untuk pengembangan budidaya tambak seluas 31.600 ha dengan tingkat pemanfaatan 1.399 ha (4,42 % ) dan budidaya air tawar (minatani ) dengan potensi sebesar 1.657 ha baru dimanfaatkan sebesar 166 ha ( 10% ). Sementara dibidang budidaya laut berupa pemeliharaan ikan didalam keramba jaring apung tersedia luas areal potensial yang dapat menampung sekitar 20.000 kantong keramba, dimana sampai saat ini belum termanfaatkan. Disamping itu terbuka peluang investasi dibidang industri pembuatan tepung ikan/udang, hal ini didukung dengan tersedianya bahan baku dari komoditi perikanan berupa ikan rucah yang cukup banyak yaitu sekitar 10.518,48 ton/th

## **3. SEKTOR PERTANIAN dan HORTIKULTURA**

Sebagai daerah tropis, agraris dengan memiliki lahan yang cukup tersedia untuk pengembangan tanaman pangan dan buah-buahan berupa padi, sagu, plawija, manggis, duku, jeruk dan nenas dengan luas lahan basah (pasang surut) 23.965 ha dan lahan kering 84.864 ha. Pengembangan perkebunan masih tersedia lahan seluas 205.294 ha dengan berbagai komoditi, untuk pengembangan usaha peternakan ditawarkan adalah peternak besar dan unggas dengan di prioritaskan pada usaha ternak sapi potong, sedangkan untuk potensi pengembangan dan Investasi di bidang kelautan dan perikanan adalah usaha budidaya perikanan air payau (tambak) dengan luas kawasan 3.160 ha yang tersebar di 8 kecamatan dan ini telah dilakukan study identifikasi dan disain Kecamatan Kateman seluas 994,970 ha dan Kecamatan Kuala Indragiri seluas 951,65 ha, budi daya kerang darah (anadara granosa) dengan yg tersebar pada 4 kecamatan (Kuindra, Reteh, Tanah merah dan Mandah) dengan luas areal 2.490 ha dan budidaya keramba jaring apung dapat dikembangkan sebanyak 20.000 unit (setiap 1 unit = 10 kantong) yang baru dimanfaatkan sebanyak 120 kantong, ini terdapat di Kecamatan Mandah, Kuindra dan Kateman.

#### **4. PELUANG INDUSTRI**

Konsekuensi logis pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk pengembangan berbagai komoditas memberikan peluang untuk pengembangan industri pengolahan /pembuatan pakan ternak dan ikan dengan potensi bahan baku yang cukup tersedia, industri pengolahan makanan dari ikan dan udang, industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan berupa pengolahan tepung beras dan ubi, industri pengolahan kecap serta makanan dari sagu dan buah buahan, Industri pengolahan kelapa terpadu beserta turunannya seperti pengolahan minyak goreng, pengolahan sabut kelapa menjadi bahan jadi, pengolahan batang kelapa menjadi bahan perabot dan pengolahan tempurung menjadi karbo aktif, Industri pengolahan kelapa sawit, dari hasil kehutanan dapat dibuat moulding, Chipwood, Sawtimber untuk modal dan peralatan rumah tangga, pengolahan limbah kayu menjadi dowel, sumpit dan bahan pensil serta industri pembuatan alat alat (suku cadang) maritim. Bidang lain yang bisa dikembangkan adalah industri pengolahan pakan ternak dan pakan ikan dengan bahan baku yang telah tersedia, misalnya kedelai dan jagung. Pada saat ini sedang dipersiapkan kawasan industri di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kawasan Industri Kuala Enok yang letaknya sangat strategis berhadapan langsung dengan Selat Malaka, Laut Natuna dan Pelabuhan Samudera Kuala Enok. Kawasan ini memiliki prospek pengembangan yang sangat tinggi bagi industri pembekuan ikan dan udang, minyak ikan dan tepung udang, minyak jagung, bungkil kopra, pengolahan kelapa sawit, margarine, stearin, oleic acid, fatie alcohol, pollyaxilated derivatives, fatty alcohol ester dan industri metallic salt. Luas kawasan industri yang akan dikembangkan adalah 880 Ha.

#### **5. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Dibumi Kabupaten Indragiri Hilir tersimpan berbagai potensi bahan galian yang belum terpromosikan, sehingga belum banyak di ketahui oleh para investor baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, potensi bahan galian yang telah diterangkan diatas terdiri dari batu bara, timah, kaolin, dan pasir kuarsa serta sumber air bawah tanah yang belum di eksplorasi, kecuali batu bara pada tahapan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Menilik pada sektor bahan galian batubara di Kabupaten Indragiri Hilir yang cadangan terekanya sekitar 60.480.000. ton dengan Nilai Kalori yaitu  $\pm$  5,606 – 6,392 Kal/gr, terdapat peluang bagi dunia usaha untuk berinvestasi di sektor



pertambangan batubara. Dengan jumlah cadangan dan nilai kalori tersebut, batubara dapat dimanfaatkan sebagai bahan baker untuk industri maupun rumah tangga seperti pada industri yang menggunakan PLTU sebagai sarana ketenagalistrikan dan briket batubara sebagai sarana memasak rumah tangga.

Nilai investasi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Indragiri Hilir pada sektor Pertambangan sumber daya bahan galian batubara cukup besar. Terdapat 6 (enam) perusahaan yang sedang berinvestasi pada sektor batubara diantaranya ;

1. PT. Bara Mitra Sejahtera
2. PT. Bara Prima Pratama
3. PT. Keritang Buana Mining
4. PT. Kemuning Tambang Sentosa
5. PT. Bara Batu Ampar Prima
6. PT. Kutai Tarmindo Bumi Sakti

Dari enam perusahaan tersebut di atas baru satu perusahaan yang telah melakukan eksploitasi dan tiga perusahaan telah memperoleh izin eksplorasi dengan Nilai Investasi mencapai ± Rp. 4 Tryliun

## **6. SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA**

Dengan bertambahnya jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, kebanyakan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, Malaysia dan Singapura serta di banggunya pelabuhan samudera Kuala Enok dan sudah diperuntukkannya lahan untuk kawasan Industri, hal ini dapat menciptakan peluang Bisnis dan Investasi pada bidang Perdagangan dan Jasa berupa kegiatan Ekspor perdagangan kapal barang dan Ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan Industri, hal ini dapat menciptakan peluang Bisnis dan Investasi pada bidang Perdagangan dan Jasa berupa kegiatan eksport.

## **7. KEHUTANAN**

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Kawasan Hutan yang sudah di Tata batas adalah seluas 395.634,94 Ha. Kawasan Hutan yang telah dikuasai/diusahakan adalah seluas 344.099,31 Ha, dengan perincian :

- Hutan Lindung P. Air Tawar, P. Cawan, P. Pisang : 34.973,05 Ha
- Hutan Produksi terbatas Sungai Keritang, Sungai Gangsal : 54.731,34 Ha
- Taman Nasional Bukit Tiga Puluh : 24.761,92 Ha

- IUPHHHK PT. Bhara Induk : 47.687,00 Ha
- IUPHHHK PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa : 44.959,00 Ha
- IUPHHHK PT. Bina Duta Laksana : 28.890,00 Ha
- IUPHHHK PT. Satria Perkasa Agung : 41.292,00 Ha
- IUPHHHK PT. Riau Indo Agro Palma : 9.570,00 Ha
- IUPHHHK PT. Sumatera Riang Lestasi : 48.635,00 Ha
- IUPHHHK KTH Sinar Merawang : 8.600,00 Ha

Adapun Kawasan yang masih Potensial untuk investasi adalah  $\pm$  51.535,63 Ha. merupakan kawasan mangrove eks Hak Pengusahaan Hutan PT. Thai Rajvithi yang berada di Kecamatan Tanah Merah, Reteh dan Sungai Batang.

## **8. SEKTOR PARIWISATA**

Dari sektor pariwisata, potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir beraneka ragam, baik wisata bahari maupun wisata alam dan wisata religi.

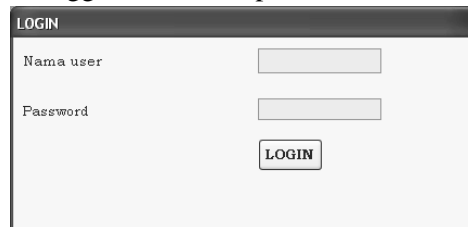
Potensi dan peluang investasi masih terbuka lebar bagi investor yang berminat dibidang kepariwisataan, yakni :

1. Pengembangan wisata Pantai Solop di Kecamatan Mandah
2. Pengembangan Wisata Bukit Berbunga, Air Terjun 86, Air Terjun Tembulon Rusa di Kecamatan Kemuning
3. Kawasan Wisata Religi, ” Situs Makam Syekh H. Abdurrahman Siddiq di Kecamatan Kuala Indragiri, dan
4. Tugu Equator di kecamatan Mandah
5. Upacara Semah Kampong
6. Rumah Kuning
7. Pantai Teritip
8. Danau Tagaraja
9. Pulau Burung
10. Bukit Api Panjang
11. Goa Api Panjang
12. Bukit Sari Intan dan Bukit Sari Segunung
13. Concong Luar

### 4.3. Model Perancangan Laporan Keuangan Berbasis IT

#### MEMULAI PROGRAM SIKADES DAN PENGISIANNYA

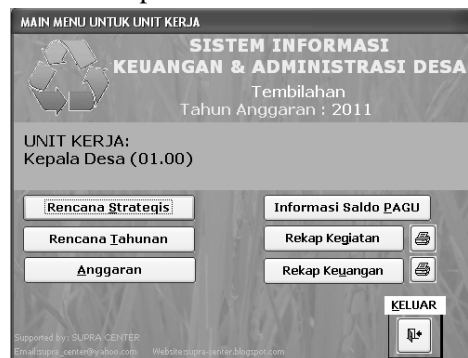
1. Buka/klik folder unit kerja (misalnya: 01.00 Kepala Desa) yang didalamnya terdapat file **Sikades4unit**
2. Buka/klik file **Sikades4unit** hingga muncul tampilan berikut:



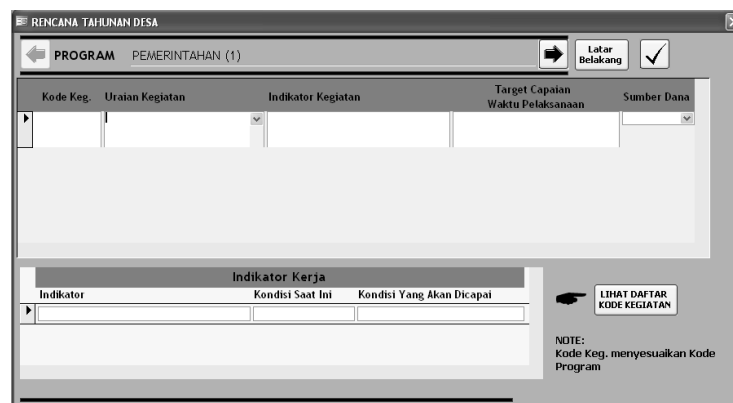
Catatan:

Isikan Nama user dan Password sesuai dengan informasi Nama user dan Password yang diberikan oleh petugas Admin

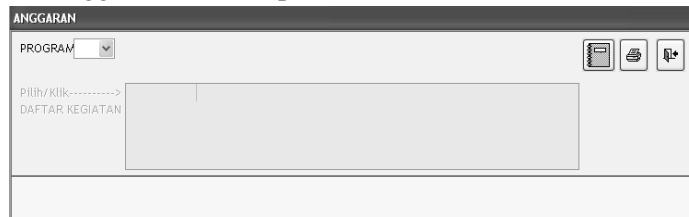
3. Setelah klik tombol **LOGIN** akan tampil main menu untuk unit kerja seperti berikut:



4. Klik tombol **Rencana Strategis** untuk mengisi informasi visi, misi dan tujuan, sesuai dengan dokumen visi, misi dan tujuan desa anda.
5. Klik tombol **Rencana Tahunan** untuk memilih Program, uraian kegiatan, dan mengisi indicator kegiatan, target capaian dan waktu pelaksanaan, sumber dana, dan indicator kerja. Contoh tampilan menu Rencana tahunan adalah seperti berikut:

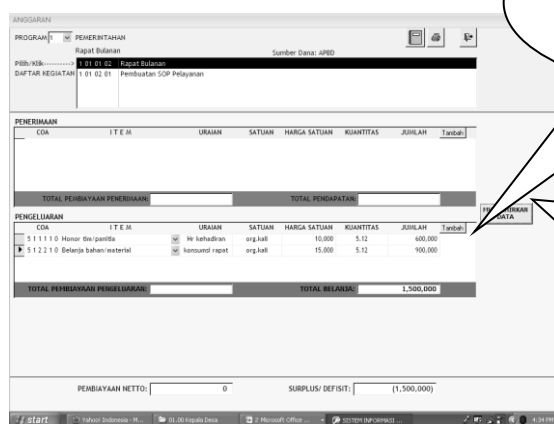


6. Setelah rencana tahunan desa ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan anggaran tiap kegiatan tersebut. Caranya dengan klik tombol **Anggaran** dari main menu untuk unit kerja. Tampilan awal menu anggaran adalah seperti berikut:




Pilih program kerja dan kegiatan yang akan disusun anggarannya, pada kolom penerimaan klik item penerimaan (bila kegiatan tersebut ada sumber penerimaannya), dilanjutkan dengan melengkapi isian kolom uraian, satuan, harga satuan dan kuantitas, selanjutnya tekan tombol **Enter**. Kemudian klik tombol **mutakhirkan data**, untuk refresh entri data yang telah dilakukan. Selanjutnya pada kolom pengeluaran klik item pengeluaran, dilanjutkan dengan melengkapi isian kolom uraian, satuan, harga satuan dan kuantitas, selanjutnya tekan tombol **Enter**. Kemudian klik tombol **mutakhirkan data** untuk refresh entri data yang telah dilakukan.


Berikut adalah contoh tampilan untuk langkah di atas:




Klik tombol **tambah** untuk mengisi item pengeluaran/penerimaan

Klik tombol **mutakhirkan data**, untuk memastikan hasil perhitungan sudah terlaksana

7. Untuk melihat tampilan rinci pendapatan/belanja/pembiayaan dengan cara klik tombol 

dan untuk mencetak dengan cara klik tombol 

klik tombol 

8. Tombol **Informasi Saldo PAGU** digunakan untuk melakukan pengecekan pagu anggaran tersedia, ajuan anggaran yang telah dibuat dan sisa pagunya.

9. Klik tombol **Rekap Kegiatan** dan tombol **Rekap Keuangan** untuk melihat tampilan rekapitulasi kegiatan dan rekapitulasi keuangan dari anggaran yang telah disusun.

10. Untuk mengakhiri penggunaan program SIKADES untuk unit kerja klik tombol 

#### 4.4. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pengujian validitas instrumen pertanyaan pada saat pretest menggunakan software SPSS dihasilkan output analisis korelasi butir pertanyaan dengan total skor pertanyaan adalah sebagai berikut:

		Pretest01	Pretest02	Pretest03	Pretest04	Pretest05	Pretest06	Pretest07	Pretest08	Pretest09	Pretest10	PretestTotal
Pretest01	Pearson Correlation	1	,108	,080	,030	,143	,131	,091	,069	,180	,120	,350**
	Sig. (2-tailed)		,283	,430	,786	,154	,194	,370	,560	,073	,233	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pretest02	Pearson Correlation	,108	1	,005	-,199*	-,006	-,028	,067	,097	,091	,074	,238**
	Sig. (2-tailed)	,283		,960	,048	,949	,785	,506	,335	,366	,462	,018
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pretest03	Pearson Correlation	,080	,005	1	,145	,063	,144	,079	,118	,095	,196	,370**
	Sig. (2-tailed)	,430	,960		,151	,598	,153	,433	,244	,348	,051	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pretest04	Pearson Correlation	,030	-,199*	,145	1	-,090	-,066	-,050	,162	,100	,125	,224*
	Sig. (2-tailed)	,786	,048	,151		,374	,517	,624	,107	,324	,215	,025
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pretest05	Pearson Correlation	,143	-,006	,063	-,090	1	,043	,088	-,136	-,013	-,033	,208**
	Sig. (2-tailed)	,154	,949	,598	,374		,688	,388	,178	,898	,747	,037
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pretest06	Pearson Correlation	,131	-,028	,144	-,066	,043	1	,719**	,560**	,699**	,680**	,758**
	Sig. (2-tailed)	,194	,785	,153	,517	,688		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pretest07	Pearson Correlation	,091	,067	,079	-,050	,088	,719**	1	,572**	,485**	,670**	,728**
	Sig. (2-tailed)	,370	,508	,433	,624	,388	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pretest08	Pearson Correlation	,069	,097	,118	,162	-,136	,560**	,572**	1	,632**	,603**	,710**
	Sig. (2-tailed)	,560	,335	,244	,107	,178	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pretest09	Pearson Correlation	,180	,091	,095	,100	-,013	,699**	,485**	,632**	1	,689**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,073	,366	,348	,324	,898	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pretest10	Pearson Correlation	,120	,074	,196	,125	-,033	,680**	,670**	,603**	,689**	1	,804**
	Sig. (2-tailed)	,233	,462	,051	,215	,747	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PretestTotal	Pearson Correlation	,350**	,236**	,370**	,224*	,208*	,758**	,728**	,710**	,770**	,804**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,018	,000	,025	,037	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* .Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Data di atas menunjukkan bahwa semua korelasi antara nilai butir pertanyaan yang meliputi pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 10 dengan nilai total semua butir pertanyaan adalah signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian berupa butir-butir pertanyaan dapat dikatakan valid atau benar-benar dapat digunakan sebagai alat ukur untuk sesuatu yang seharusnya diukur.

Dari hasil uji korelasi antara skor jawaban nomor ganjil dengan skor jawaban nomor genap pada saat pre test dihasilkan output sebagai berikut:

		Skor Ganjil Pre	Skor Genap Pre
Skor Ganjil Pre	Pearson Correlation	1	,998**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Skor Genap Pre	Pearson Correlation	,998**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

\*\* .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil korelasi di atas, maka nilai  $r_b$  adalah sebesar  $(2 \times 0,998) / (1 + 0,998) = 0,99$  yang artinya semua skor butir pertanyaan pada instrumen penelitian adalah reliabel, artinya

kuesioner sebagai instrumen penelitian memiliki konsistensi yang tinggi dalam mengukur variabel yang diteliti.

Dari hasil uji hipotesis menggunakan paired sample t test yang diolah menggunakan software SPSS, didapatkan hasil output sebagai berikut:

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Skor Postest	38,77	100	9,870	,987
	Skor Pretest	24,15	100	12,473	1,247

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Skor Postest - Skor Pretest	14,620	10,606	1,061	12,516	16,724	13,785	99	,000

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman para aparatur desa meningkat setelah dilaksanakan workshop intensif SIADUK yang didukung teknologi informasi, terbukti bahwa nilai skor pemahaman tentang pengelolaan desa sebelum dilakukan workshop SIADUK adalah sebesar 24,15 menjadi 38,77. Dari uji signifikansi ditunjukkan bahwa perbedaan kondisi pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut adalah signifikan yang ditunjukkan dengan nilai sig sebesar 0,000 yang artinya Hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan pemahaman para aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa antara sebelum dan sesudah pelaksanaan workshop SIADUK yang didukung teknologi informasi.

Nilai teoretis maksimal rata-rata jawaban responden adalah 50 dan minimal sebesar 10 sehingga rata-ratanya adalah 30, mendasarkan pada jumlah pertanyaan sejumlah 10 butir pertanyaan dan masing-masing butir pertanyaan memiliki nilai dengan kisaran antara 1 sampai dengan 5. Berdasarkan data di atas maka meskipun belum maksimal, sebelum dilakukan workshop pemahaman para aparatur desa ada di bawah rata-rata (24,15) dan setelah dilakukan workshop meningkat menjadi di atas rata-rata (38,77)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pemerintahan desa sebagai sebuah institusi pelayanan publik dengan menggunakan dana publik, sangat penting untuk senantiasa menciptakan suatu mekanisme transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik tersebut dalam rangka mewujudkan Good Governance. Organisasi yang selalu belajar menjadi stimulus yang kuat, terkait fungsi pemerintah sebagai agent yang melakukan fungsi perubahan bagi masyarakat. Tuntutan pengelolaan pemerintahan desa yang baik semakin meningkat dengan semakin tingginya daya kritis masyarakat. Terkait hal tersebut pemerintah harus merespon dengan meningkatkan kualitas manajerialnya termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran dari sistem informasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan temuan di atas penting kiranya bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi dukungan sistem informasi khususnya sistem informasi keuangan yang didukung teknologi informasi untuk dapat meningkatkan pemahaman para aparatur desa dalam memahami filosofi dan mampu melaksanakan tatakelola keuangan desa yang baik sehingga bisa terdukung terwujudnya good government governance menuju masyarakat madani.

#### **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masih lemahnya SDM di tingkat desa dalam pemanfaatan IT – terkait laporan keuangan desa.
2. Masih minimnya infrastruktur jaringan internet di masing –masing desa, sehingga menjadi kendala dalam laporan keuangan desa berbasis on-line.
3. Perlu adanya keseriusan oleh pihak aparat desa, untuk tetap memanfaatkan aplikasi laporan keuangan desa.
4. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat, hendaknya menjadi pilihan alternative untuk tetap ditingkatkan
5. Tiap-tiap desa wajib membangun link-investasi untuk peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Soni. 2009. *Pengaruh Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri)*. Jurnal Akuntansi (Online), Jilid 5, No.4, (<http://webcache.googleusercontent.com>, diakses 19 Juni 2011).
- Adisapto, Gunawan & Asri, Marwan. 2007. *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta : BPFPE.
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arif Bahtiar, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat
- Alhusin, Syahri, 2003. *Aplikasi Statistik Dengan SPSS.10 for windows*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Arif, Bahtiar, Muchlis, Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Carl S, Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess. 2008. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Darise, Nurlan, Drs, Ak, M.Si. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 2*. Jakarta : Indeks.
- Departemen Keuangan. 2005. *Sistem Akuntansi Instansi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Keuangan. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara RI
- Departemen Keuangan. 2005. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO 171/PMK/2007*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
- Gibbins, M., Richardson, A., & Waterhouse, J. (1990). The Management of Corporate Financial Disclosure: Opportunism, Ritualism, Policies, and Processes. *Journal of Accounting Research*, 28(1), 121-143
- Halim Abdul.2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat



- Handayani, J. 2007. *Penerapan SAKD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Skripsi tidak diterbitkan.* Bandung:Universitas Padjajaran
- Hasan, M. Iqbal, Ir.,MM. 2004. *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif) Edisi Kedua.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat
- Ismaya, Sujana . 2006. *Kamus Standar Akuntansi.* Jakarta: Pustaka Grafika
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Meliala S, Tulis. 2007. *Perpajakan dan akuntansi Pajak.* Jakarta : Semesta Media
- Mardiasmo Prof, Dr, MBA, Ak. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta : Salemba Empat.
- Munandar, M, Drs. 2001. *Budgeting Edisi I.* Yogyakarta : BPFE
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta : salemba Empat
- Nordiawan, Deddi, Putra I.S, Rahmawati Maulidah. 2008. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta : Salemba Empat.
- O'Brein, James A., (2005), "Pengantar Sistem Informasi", Penerbit : Salemba 4, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13. 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.58. 2005. *Tentang Siklus Pengelolaan Keuangan.* Jakarta.
- Peraturan Walikota Bandung No.835. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Bandung : Walikota Bandung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2005 tentang Desa
- Rudianto. 2009. *Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran (Pengggaran).* Erlangga.
- Sabeni, Arifin dan Ghozali Imam.2001. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan.* Yogyakarta : BPFE
- Santoso, Hendri. 2008. *Majalah Warta Pengawasan Edisi V01/No.1.* Bandung.
- Sugiyono, Dr, Prof. 2009. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, Dr, Prof. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.
- Sumardji, P Drs. Pratama Yudha, SE. Rosita, SE. 2006. *Kamus Ekonomi Lengkap Cetakan Pertama.* Jakarta : WIPRESS.
- Siegel,Gary & Helene Ramanauskas Marconi, "Behavioral Accounting",South Western Publishing Co., cincinnati, Ohio, 1989.
- Sugiyono, 2009. *Statistika untuk Penelitian.* Bandung : ALFABETA

Sri Maharsi, 2000. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000:  
127 – 137 Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas  
Kristen Petra

Undang-Undang Dasar No.17. 2003. *Keuangan Negara*. Jakarta.

Undang-Undang no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keyangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

United Nations Development Programme, 1997. Governance for Sustainable  
Human Development. New York: UNDP.

<http://www.Pemerintah.Kota.Bandung.htm>, di akses 20 Maret 2011